

**ANALISIS KOMPARATIF KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PALEMBANG SEBELUM DAN SESUDAH
PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB**



Skripsi Oleh:
ALICIA RIZANANDA PUTRI
01121003042
Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
ANALISIS KOMPARATIF KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PALEMBANG SEBELUM DAN SESUDAH
PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB

DISUSUN OLEH :

NAMA : ALICIA RIZANANDA PUTRI
NIM : 01121003042
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KAJIAN : PERPAJAKAN

DISETUJUI UNTUK DIGUNAKAN DALAM UJIAN KOMPREHENSIF


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal

Ketua:

15 Desember 2015


Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA

NIP. 197405111999032001

Tanggal

Anggota

7 Desember 2015


Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA

NIP. 196508161995121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS KOMPARATIF KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PALEMBANG SEBELUM DAN SESUDAH
PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB

DISUSUN OLEH :

NAMA : ALICIA RIZANANDA PUTRI
NIM : 01121003042
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KAJIAN : PERPAJAKAN

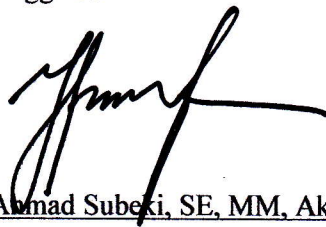
Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Desember 2015 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua:



Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

Anggota:



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

Anggota:



Ika Sasti Ferina, SE, Msi, Ak, CA.
NIP. 19780210200111222001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alicia Rizananda Putri
NIM : 01121003042
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Analisis Komparatif Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Dearah Kota Palembang Sebelum dan Sesudah Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

Pembimbing:

Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak., CA.
Anggota : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
Tanggal Ujian : Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., CA

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 30 Desember 2015

Pernyataan,



Alicia Rizananda Putri

NIM. 01121003042

MOTTO

“Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”

“Barangsiapa bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhannya
itu adalah untuk dirinya sendiri.”

[QS Al-Ankabut (29): 6]

*“The one who deserves to win is the one who
keeps on struggling till the end.”*

(AliciaRP)

*Dipersembahkan Kepada:
Kedua Orang Tuaku tercinta
Adikku, Soraya Aprila Tassya
Keluarga Besar
Muhammad Randhika Dharmawan
Almamater Kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Sebelum dan Sesudah Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang serta membandingkannya dengan keadaan sebelum pelaksanaan pengalihan. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. **Ibu Relasari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. **Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan **Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. **Ibu Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi dan Dosen Penguji Skripsi yang telah membantu, meluangkan waktu, serta memberikan kritik dan saran.
7. **Ibu Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan konsultasi akademik selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. **Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang** yang telah membantu serta memberikan informasi terkait penelitian mengenai pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dalam skripsi penulis.
11. Kedua orang tua tercinta yang tak hentinya berdoa dan memberikan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Adikku, **Soraya Aprila Tassya** yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
13. *Partner* terbaik, **Muhammad Randhika Dharmawan** yang telah merelakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
14. Sahabat – sahabat terbaikku, **Revinali Pitaloka, Meri Amalia Utami, Dian Firdiyanti, Rizky Puspa Lestari, Elsi Wulandari, Nur Muhammad Syah**. Terima kasih atas waktu, kebersamaan, keceriaan, dan kerjasamanya selama ini.
15. Teman – teman seperjuangan Akuntansi Unsri angkatan 2012, *see you on top!*
16. Rekan – rekan pengurus BEM KM Unsri Kabinet Unsri Berdaya 2014.
17. Rekan – rekan kabinet dan pengurus BEM FE Unsri Kabinet Progress 2014-2015 yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga.

18. Rekan – rekan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumsel.

Inderalaya,

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB

Oleh:

Alicia Rizananda Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengungkap hubungan sebab akibat antar fenomena. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2008-2010 dan 2012-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pengukuran efektivitas untuk menganalisis pengaruh pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Palembang dan metode pengukuran kontribusi untuk membandingkan rata – rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 dan BPHTB.

Dari analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah telah berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang yang terbukti melalui peningkatan rata – rata efektivitas pemungutannya dari yang semula 102.73% menjadi 114.67%. Secara rata – rata, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang juga meningkat dari yang sebelumnya sebesar 43.63% menjadi 59.77% sesudah adanya pengalihan.

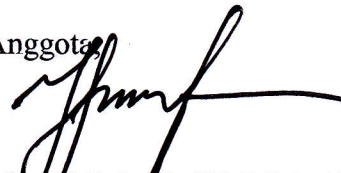
Kata kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2, BPHTB

Ketua,



Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA.
NIP. 197405111999032001

Anggota



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP. 196508161995121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA.
NIP. 197405111999032001

ABSTRACT

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL TAXES CONTRIBUTION TO LOCAL REVENUE OF PALEMBANG BEFORE AND AFTER THE TRANSFER OF PBB-P2 AND BPHTB

By:

Alicia Rizananda Putri; Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA; Ahmad Subeki,
SE, MM, Ak, CA.

The aims of this research are to disclose the impact of transfer of PBB-P2 and BPHTB as local taxes and to compare its contribution to Local Revenue of Palembang. This research used qualitative descriptive analysis method which will describe the cause-and-effect of the phenomenas. The type of data used in this research is primary data that was directly obtained from Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang which are Local Taxes Realization and Local Revenue Report of Palembang in 2008-2010 and 2012-2014. The analysis techniques used in this research are effectiveness measurement method to analyze the impact of transfer of PBB-P2 and BPHTB to Local Taxes of Palembang and contribution measurement method to compare the average of contribution of Local Taxes to Local Revenue of Palembang before and after the transfer of PBB-P2 and BPHTB.

Based on the analysis, the transfer of PBB-P2 and BPHTB as local taxes has a positive effect on local taxes revenue of Palembang which is proven by the increase of the average of local taxes effectiveness from 102.73% to 114.67%. And on average, the contribution of local taxes to Local Revenue of Palembang is increased from 43.63% to 59.77% after the transfer of PBB-P2 and BPHTB.

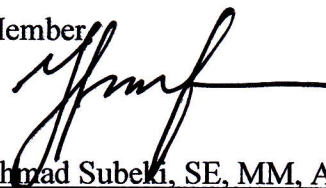
Keywords : local taxes, local revenue, PBB-P2, BPHTB

First Advisor,



Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA.
NIP. 197405111999032001

Member



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP. 196508161995121001

To be Aware of,
Head of Accounting Department



Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA.
NIP. 197405111999032001

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Alicia Rizananda Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/22 Agustus 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan Sukabangun 1 Komp. Bir
Bintang No. 8 Palembang 30151
Alamat *e-mail* : aliciarizanandaputri@gmail.com



Pendidikan Formal

1. SD Muhammadiyah 6 Palembang (2000-2006)
2. SMP Negeri 3 Palembang (2006-2009)
3. SMA Negeri 6 Palembang (2009-2012)

Pendidikan Non-Formal

1. Gloria English Course Palembang (2005-2012)
2. Lembaga Pendidikan Akuntansi PROSPEK (2013)

Pengalaman Organisasi

1. Staf Manajemen SDM BO EIT Unsri (2013-2015)
2. Staf Kementerian Hubungan Internal BEM KM Unsri (2014)
3. Pengurus aktif Divisi Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia (GenBI) SumSel (2014-2015)
4. Sekretaris Departemen Advokasi dan Hubungan Internal BEM FE Unsri (2014-2015)

Beasiswa yang Diterima

1. Beasiswa Bank Indonesia (2014)
2. Beasiswa PPA (periode Januari-Juni 2015)
3. Beasiswa PPA (periode Juli-Desember 2015)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Otonomi Daerah	8
2.1.2 Desentralisasi Fiskal.....	10
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan...	11
2.1.3.1 Objek Pajak PBB-P2.....	11
2.1.3.2 Subjek Pajak PBB-P2.....	13
2.1.3.3 Dasar Pengenaan PBB-P2	13
2.1.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	15
2.1.4.1 Objek Pajak BPHTB	15
2.1.4.2 Subjek Pajak BPHTB.....	18
2.1.4.3 Tarif, Dasar Pengenaan, Saat Terutang, dan Perhitungan BPHTB.....	19
2.1.5 Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB.....	21
2.1.3.1 Perubahan PBB-P2	23
2.1.3.2 Perubahan BPHTB	25
2.1.3.3 Manfaat Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB	26
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	27
2.1.4.1 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Metode Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analisis.....	36
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Data Penelitian.....	39
4.1.1 Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	39
4.1.2 Struktur Organisasi	41
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	43
4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Analisis Pengaruh Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang	49
4.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Sebelum dan Sesudah Peralihan PBB-P2 dan BPHTB	55
4.2.2.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Sebelum Peralihan PBB-P2 dan BPHTB	56
4.2.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Sesudah Peralihan PBB-P2 dan BPHTB	58
BAB V PENUTUP	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran	63
Daftar Pustaka.....	65

Agenda Konsultasi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 NPOP/DPP, NPOPTKP, Saat Terutangnya BPHTB.....	19
Tabel 2.2 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34 Tahun 2000 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009	23
Tabel 2.3 Perbandingan PBB pada UU PBB dengan UU PDRD	24
Tabel 2.4 Perbandingan BPHTB pada UU BPHTB dengan UU PDRD	25
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas Pemungutan Pajak.....	37
Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Penerimaan PBB-P2 Sebelum dan Setelah Pengalihan	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah guna mewujudkan program pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut adalah melalui pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah melalui pembangunan daerah. Tentunya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan utama yang paling dapat diandalkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (Sanusi, 2003:18). Komponen utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang didukung oleh pernyataan dari Mahmudi (2010:21) yang menyebutkan bahwa:

“Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah.”.

Dan pernyataan dari Abdul Halim (2004:142) yang juga menyebutkan bahwa:

“Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab

itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah ... “.

Untuk mencapai semua tujuan dari pembangunan daerah tersebut maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan mutlak dibutuhkan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan melaksanakan Desentralisasi Fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) yang secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010 memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola pajak yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah merupakan salah satu langkah nyata pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2011 dengan 4 tahun tahapan persiapan yang disesuaikan dengan kesiapan masing – masing daerah yang sudah harus dilaksanakan oleh setiap daerah selambat – lambatnnya pada 1 Januari 2014 sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 182 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan untuk kota Palembang sendiri, pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak tahun 2012.

Secara sederhana tentunya akan terdapat perbedaan pada struktur Penerimaan Daerah Kota Palembang antara sebelum dan sesudah adanya pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang serta membandingkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, yaitu untuk tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010 dengan sesudah implementasi pengalihan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, yaitu tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014. Adapun tahun anggaran 2011 tidak digunakan sebagai objek penelitian karena tahun 2011 dianggap sebagai tahapan transisi. Pengaruh pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah diukur dengan cara membandingkan tingkat efektivitas rata – rata pemungutan pajak daerah, adapun tingkat kontribusinya diukur dengan cara membandingkan kontribusi rata – rata penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang untuk tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010 sebagai periode sebelum dengan tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 sebagai periode sesudah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dari data dan informasi yang diperoleh dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan pokok bahasan, yaitu “Bagaimana perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengalihan PBB-P2 dan BPHTB?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang
2. Untuk membandingkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana pengaruh pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dan membandingkannya dengan keadaan sebelum adanya pengalihan.

- 2) Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerahnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikan dalam lima bab, dimana tiap – tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan permasalahan penelitian, seperti pengertian dari otonomi daerah, desentralisasi fiskal, perubahan atas Pajak Bumi dan bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perubahan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan pajak daerah, dan pendapatan asli daerah serta berisikan juga penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan yang berupa sejarah singkat pembentukan, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Adelina, Rima. 2013. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.1, No.2.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi 2009. Jakarta: Grasindo.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Handoko, Sri. 2011. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi Daerah, Vol.1, No.1.
- Lestari, Voni. 2014. *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri tahun 2012 dan 2013*. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.3, No.1.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Undang – Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ramadhan, Jogi Fahrival. 2014. *Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kota Surabaya*. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.2, No.3.
- Sanusi, Anwar. 2003. *Sumber Dana Pembangunan Daerah*. Malang: Buntara Media.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

- Tim Penyusun. 2012. *Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2012*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widiowati, Leny. 2014. *Analisis Komparatif Kemampuan Keuangan Daerah Di Era Otonomi, Sebelum dan Pasca Pendaerahan BPHTB*. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.2, No.3.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*.
<http://www.dispenda.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=struktur-organisasi>. Diakses pada 13 November 2015.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*.
<http://dispenda.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=selayang-pandang>. Diakses pada 13 November 2015.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Tugas Pokok dan Fungsi*.
<http://dispenda.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=tupoksi>. Diakses pada 13 November 2015.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*.
<http://www.dispenda.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=visi-dan-misi>. Diakses pada 13 November 2015.
- Direktorat Jendral Pajak. *Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah*.
<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>. Diakses pada 9 September 2015.
- Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan. *Desentralisasi Fiskal*.
<http://www.wikiapbn.org/desentralisasi-fiskal/>. Diakses pada 9 September 2015.